



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 8582-8590

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Perkembangan Partisipasi Politik Menuju Demokrasi Pemilu 2024

Friska Lorentian Purba<sup>1</sup>, Natasya Adriani<sup>2</sup>, Nike Margaretha Br Sembiring<sup>3</sup>, M. Iraqi Fauzi<sup>4</sup>, Tessa Lonika Simanullang<sup>5</sup>, Julia ivanna<sup>6</sup>

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan

Email: [friskapurba169@gmail.com](mailto:friskapurba169@gmail.com) <sup>1</sup>✉

### Abstrak

Dalam lingkup demokrasi, partisipasi masyarakat dalam politik sangat mempengaruhi legitimasi negara. Partisipasi politik yang semakin tinggi, akan menunjukkan bahwa masyarakat memang mahami, mengikuti dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan kewarganeraan. Indonesia adalah suatu negara demokrasi, salah satu contoh demokrasi ialah Pemilu. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pemilu, terutama pemilu yang akan datang yaitu pemilu 2024 mencerminkan bagaimana tingkat perkembangan demokrasi di negara Indonesia. Dimana asas pemilu negara Indonesia bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum yang adil dan berintegritas, berkaitan dengan penggunaan hak pilih oleh masyarakat dan memahami tujuan memilih pemimpin yang bisa membawa kehidupan yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan study literatur yaitu serangkaian kegiatan pengumpulan data pustaka, baik itu dari jurnal, buku, karya ilmiah dan skripsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan partisipasi politik masyarakat dalam menuju Pemilihan Umum tahun 2024.

Kata Kunci: *Partisipasi Politik, Masyarakat, Pemilu 2024*

### Abstract

In the scope of democracy, public participation in politics greatly affects the legitimacy of the state. The higher political participation, will show that people do understand, follow and participate in civic activities. Indonesia is a democratic country, one example of democracy is elections. The level of community participation in elections, especially the upcoming elections, namely the 2024 elections, reflects how the level of democratic development in the country of Indonesia. Where the principle of elections in Indonesia is that elections are held directly,

Friska Lorentian Purba, Natasya Adriani, Nike Margaretha Br Sembiring<sup>3</sup>, M. Iraqi Fauzi, Tessa Lonika Simanullang, Julia ivanna

openly, freely, secretly, honestly and fairly. Fair elections and integrity, related to the use of voting rights by the public and understanding the purpose of choosing leaders who can bring a better life. This research uses a literature study, which is a series of library data collection activities, both from journals, books, scientific papers and theses. The purpose of this research is to find out how the development of community political participation in the 2024 General Election.

Keywords: *Political Participation, Community, General Election 2024*

## PENDAHULUAN

Tingginya suara masyarakat dalam pemilu merupakan harapan ideal bagi terselenggaranya pemilu parlemen sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan pemilu menjadi penyelenggaraan pemilu yang bermutu dan mencerminkan tingginya kesadaran atau tanggung jawab serta sinergi antar pihak terkait. Untuk mencapai partisipasi masyarakat yang tinggi diperlukan strategi yang tepat untuk memahami keadaan masyarakat. Pemahaman masyarakat dapat dilihat melalui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, yakni dengan mengidentifikasi atau mengakui komunitas, mengambil langkah-langkah untuk memperkuat dan melindungi komunitas.

Partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan implementasi demokrasi di Indonesia. Partisipasi masyarakat penting untuk legitimasi kekuasaan dalam pemerintahan. Sebagaimana asas pemilu Indonesia bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil, hal inilah yang menjadi landasan dalam menganalisis partisipasi masyarakat. Tingginya persentase warga yang tidak memilih atau datang ke tempat pemungutan suara (TPS) menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dan buruknya kualitas demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan yang diterima pemerintah Indonesia.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu parlemen menjadi alasan mengapa perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip pemilu dan hal-hal lain yang terkait dengannya guna mencapai penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas. Permasalahan ketidakhadiran masyarakat pada saat pemungutan suara menunjukkan bahwa sistem pemerintahan demokratis di Indonesia perlu dievaluasi atau diterapkan. Berdasarkan data, Indonesia dengan jumlah 548 wilayah yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 98 kota merupakan tantangan karena struktur penduduk Indonesia yang sangat besar dan beragam.

Dalam kaitannya dengan masyarakat luas, pemilu dapat dilihat sebagai pertarungan antagonisme politik, dimana masyarakat mempunyai hak untuk menentukan siapa yang baik dan siapa yang buruk, siapa yang jujur atau tidak, atau siapa yang dianggap bermoral dan tidak bermoral. dasar evaluasi calon yang dipilih baik oleh badan eksekutif maupun legislatif (Hiariej: 2014). Bahasa moral lainnya dapat dikatakan sebagai patriotisme dalam perjuangan merebut kepercayaan masyarakat. Analisis berdasarkan moral judgement atau metode antagonisme berikut ini dapat dilihat pada pemilu presiden Indonesia, dimana berdasarkan konteks antagonisme cenderung memutuskan bahwa partai yang dianggap baik akan memenangkan pemilu (Flahaut: 2003).

Kualitas implementasi demokrasi pada pemilu 2024 terlihat melalui evaluasi pada pemilu sebelumnya. Dalam perdebatan yang sedang berlangsung, dampak pemilu sebelumnya dipadukan dengan hasil yang dicapai pemerintah dalam melaksanakan amanah yang diberikan sesuai dengan tujuan kesejahteraan sosial nasional. Keterkaitan antara penyelenggaraan pemilu dengan hasil kerja pejabat dimasukkan sebagai satu kesatuan dalam persiapan pelaksanaan pemilu, memberikan pelayanan yang maksimal mulai dari pendataan awal hingga penghitungan suara untuk menampilkan hasil pemilu sesuai dengan ketentuan. hasil pemilu. prinsip transparansi.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta yang sudah ada dan mendeskriptifkan sesuai fenomena. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ialah pengungkapan dan pengklarifikasian mengenai suatu fenomena atau pernyataan social. Penelitian deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Melalui metode ini, penulis akan menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data- data yang relevan diperoleh serta menafsirkan data-data yang dimaksud sebagai

suatu proses analisa untuk mencari relevansi antar variabel. Penulis melakukan metode Wawancara (Interview), Wawancara dilakukan dengan pihak yang berkompeten atau berwenang serta yang dianggap lebih mengetahui dan memahami masalah peneliti memberikan informasi dan keterangan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

### Partisipasi Politik

Di Indonesia, partisipasi politik sangat penting untuk menjaga sistem demokrasi. Meningkatnya partisipasi politik di suatu negara menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai pemikiran yang bijaksana dan memahami pentingnya politik dalam mentransformasi suatu negara. Secara umum, partisipasi politik dapat diukur dari jumlah masyarakat yang bersedia menganggur. Partisipasi politik secara umum tidak akan pernah lepas dari pemilihnya, khususnya pemilihan umum. Warga negara yang memenuhi persyaratan untuk memilih aktor politik memutar kekuasaan adalah pemilih. Tidak berlaku bagi pengemudi pemula, yang dimaksud dengan pengemudi yang baru pertama kali mengajukan perizinan umum. Berdasarkan keterangan para perintis, mereka diidentifikasi sebagai WNI yang berusia 17 tahun atau belum 17 tahun namun telah menikah.

Terdapat perbedaan kualitas pelaksanaan demokrasi antara Indonesia, negara marginal, dan negara lain yang sistem politik nasionalnya terdiversifikasi. Berdasarkan agenda demokrasi, demokrasi Indonesia mempunyai definisi yang jelas tentang idiom Pancasila yang perlu diperlakukan sebagai sesuatu yang sakral. Hal ini berkaitan dengan upaya kebijakan yang akan dilakukan pada masing-masing wilayah pemerintahan yang mempunyai karakteristik berbeda-beda, sehingga setiap kebijakan yang digagas akan mempunyai karakteristik yang sesuai atau dapat dilaksanakan pada suatu wilayah pemerintahan tertentu.

Faktor-faktor yang menghambat kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat terhadap isu-isu politik dapat muncul melalui jalur swasta atau organisasi, jika individu tersebut termotivasi untuk berpartisipasi dalam politik dengan aktif dalam organisasi tertentu atau dengan mengamati media.
2. Menganalisis karakteristik sosial yang berdampak negatif terhadap partisipasi politik,

meskipun status politik individu berbeda-beda, banyak pihak yang menentang otoritas politik.

3. Baik sistem politik nasional maupun sistem kepartaian berdampak pada dinamika pemula. Bangsa yang demokratis selalu bersedia berpartisipasi karena menghargai kebaikan bersama.
4. Perbedaan wilayah mempengaruhi perbedaan kinerja individu. Karena preferensi pribadi, lingkaran pemungutan suara menghasilkan pemilih pemula yang berpartisipasi tanpa paksaan.

Ada beberapa faktor yang secara konsisten melemahkan kehidupan politik mereka sehari-hari dan menghalangi mereka untuk menjalankan peran kepemimpinan mereka secara efektif. Misalnya, faktor rasa tidak stabil akibat perubahan standar ekonomi dan pendidikan serta kesenjangan gender. Masalah ini masih berkembang karena status perempuan dalam politik lebih menonjol dibandingkan laki-laki, dan mereka yang memiliki status sosial atau ekonomi lebih tinggi cenderung lebih aktif dan memiliki kemauan lebih besar untuk berpartisipasi dalam masyarakat dibandingkan mereka yang berstatus sosial lebih rendah. Kemudian, keluarga juga menjadi faktor pengaruh atau penghambat partisipasi politik.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memudahkan peserta baru berpartisipasi. Pertama dan terpenting, pemerintah harus rajin mengatur proses transisi. Oleh karena itu, aturan pelanggaran dikembangkan sesuai dengan spesifikasi teknis dan pedoman etika. Selain itu, setiap partai politik profesional, termasuk KPU, harus berusaha lebih tegas terhadap pendatang baru di bidang sosial dan politik guna memperdalam pemahaman mereka terhadap permasalahan tersebut. Terakhir, untuk melawan monetarisme, para pendatang baru perlu memperkuat pendidikan politik mereka. Selain itu, pemilih yang bijak memilih pemimpin.

Partisipasi masyarakat menentukan dalam membentuk ruang publik, dalam setiap proses politik melahirkan sikap politik setawal, dalam ruang publik berkaiannerat dengan partisipasinya-rakat dalam demokratisasi (Adi Himawan, 2013). Ruang publik tercermin di semua lapisan masyarakat, kecuali di komunitas lokal dimana anak-anak kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam aktivitas kriminal. Perkembangan ruang publik mengakomodasikan suatu proses masyarakat yang bersama tentang kemampuan komunikasi. Habermas (1989) mengkategorikan ruang publik menjadi dua kategori: ruang publik politik dan ilmu sosial ruang publik. Realisme politik tidak hanya menyoroti volatilitas

perekonomian tetapi juga menyoroiti cara-cara perubahan struktur sosial masyarakat. Selain itu, keterlibatan dalam partai politik juga penting. Iklim politik saat ini telah mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan. Menurut teori, semakin banyak politisi yang menawarkan lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memajukan tujuan dan nilai-nilai mereka serta keinginan untuk mempengaruhi isu-isu politik dan sosial.

Partai politik merupakan sarana terselenggaranya sistem demokrasi sesuai dengan hukum yang telah ada sejak awal sejarah bangsa Indonesia. Hal ini terutama berlaku pada keyakinan masyarakat yang anti-musyawah, namun juga berlaku pada proses pembentukan sikap konsisten yang dapat menimbulkan konflik jika keyakinan musyawarah tersebut ditegakkan.

Pendekatan yang berkualitas dapat ditambah melalui pendekatan secara inklusifisme, yang melihat pada aspek sosial, budaya, ekonomi, dan ekonomi termasuk berdasarkan pemahaman yang dilakukan tepatnya dalam pembagian wilayah di Indonesia. Hal ini terkait dengan upaya yang dilakukan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional Indonesia yang berbasis pada pendentan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, peningkatan partisipasi masyarakat tidak dapat dicapai melalui kegiatan pemilu, namun sangat didukung oleh kondisi masyarakat luas yang telah dimulai.

#### Pemilu dan Upaya Wujudkan PEMILU 2024 Berkualitas

Pemilihan umum merupakan peristiwa penting sebagai perwujudan pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi yang dianut negara Indonesia. Pemilihan umum adalah suatu proses demokratis di mana warga negara berhak memilih wakil-wakil mereka untuk mengepalai pemerintahan atau lembaga-lembaga legislatif. Pemilu merupakan mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah dan kepemimpinan negara.

Pelaksanaan dan proses pemilu tentu telah diatur dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), Undang-undang ini mengatur seluruh proses pemilihan umum di Indonesia, termasuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada, Undang-undang ini fokus pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Selanjutnya juga telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Termasuk Panitia pengawas Kecamatan yang

dapat melakukan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dan pemilihan berdasarkan mandate yang diberikan Bawaslu kabupaten dan kota kepada panitia pengawas kecamatan.

Untuk mewujudkan Pemilu 2024 berkualitas yang adil dan berintegritas, berkaitan dengan penggunaan hak pilih oleh masyarakat dan memahami tujuannya memilih pemimpin yang bisa membawa kehidupan negara yang lebih baik. Pemilu yang efektif dan efisien disini, masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya pada calon pemimpin yang tepat memiliki visi dan misi yang jelas, mudah dimengerti masyarakat dan bisa dilaksanakan visi misi tersebut, tidak omong kosong saja.

Dalam mewujudkan pemilu 2024 yang berkualitas dan pandai dalam menentukan arah pemerintahan, harus dibantu upaya masyarakat itu sendiri terutama upaya pemerintah. Pemerintah dapat mengambil berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024. Beberapa upaya yang mungkin diambil antara lain:

1. Edukasi Pemilih: Melakukan kampanye edukasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu, prosedur pemilihan, dan dampak partisipasi aktif dalam proses demokratis.
2. Pendidikan Politik Menyelenggarakan program pendidikan politik di sekolah-sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan literasi politik masyarakat dan kesadaran akan isu-isu politik.
3. Kampanye Sosial Media: Memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pemilu, mendorong partisipasi, dan memberikan penjelasan tentang kandidat dan platform mereka.
4. Pemberdayaan Pemuda: Mendorong partisipasi aktif pemuda dengan mengadakan program dan acara yang relevan, serta memberikan peran yang signifikan dalam proses demokratis.
5. Pelatihan Petugas Pemilu: Memberikan pelatihan kepada petugas pemilu untuk meningkatkan profesionalisme dalam menyelenggarakan pemilu dan memberikan pelayanan yang baik kepada pemilih.
6. Promosi Keterlibatan Perempuan: Mendorong keterlibatan perempuan dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun kandidat, dengan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin ada.

Tetapi perlu ditegaskan tidak hanya peran pemerintah saja yang dibutuhkan dan diperlukan. Upaya dari masyarakat sendiri sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemilu

yang berkualitas dan mendapat pemimpin negara dan lembaga - lembaga yang akan membawa negara lebih baik lagi dan mensejahterakan rakyat. Berikut beberapa upaya masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas:

1. Pendidikan Politik Mandiri: Masyarakat dapat meningkatkan literasi politik mereka sendiri dengan membaca, mengikuti berita politik, dan memahami posisi kandidat serta platform mereka.
2. Partisipasi Aktif dalam Kampanye: Mengambil peran aktif dalam kampanye dan diskusi politik di lingkungan sekitar untuk memotivasi partisipasi lebih banyak warga dalam proses pemilu.
3. Pemantauan Pemilu: Masyarakat dapat membentuk kelompok pemantau pemilu untuk memantau tahapan-tahapan pemilu, termasuk proses pendaftaran pemilih, kampanye, dan pemungutan suara.
4. Penggunaan Media Sosial yang Bertanggung Jawab: Berpartisipasi dalam percakapan politik di media sosial dengan cara yang bertanggung jawab, membagikan informasi yang valid, dan menghindari penyebaran berita palsu.
5. Mengikuti Penyuluhan Pemilih: Masyarakat dapat menyelenggarakan sesi penyuluhan atau diskusi terbuka untuk membahas isu-isu politik, calon-calon, dan platform pemilu guna meningkatkan pemahaman pemilih.
6. Pentingnya Suara Setiap Pemilih: Mendorong teman, keluarga, dan tetangga untuk menggunakan hak pilih mereka, serta menyadarkan mereka akan dampak pentingnya partisipasi setiap pemilih dalam proses demokratis.
7. Ikut Partisipasi dalam Organisasi Sipil: Bergabung dengan organisasi non-pemerintah yang fokus pada pemantauan pemilu, advokasi, dan edukasi politik untuk memberikan suara dan dukungan yang lebih besar.

## SIMPULAN

Dari studi literatur ini, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat memainkan peran penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks Pemilihan Umum 2024. Faktor-faktor seperti kesadaran masyarakat, karakteristik sosial, sistem politik, dan perbedaan wilayah mempengaruhi partisipasi politik. Peran pemerintah, partai politik, dan pendidikan politik juga diakui sebagai faktor penting dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat. Selain itu, penting untuk memperhatikan pendekatan inklusifisme dalam meningkatkan kualitas partai politik dan memperluas partisipasi

masyarakat, bukan hanya melalui pemilu tetapi juga melalui kondisi masyarakat secara keseluruhan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Rismawati, R., Ulandari, P., Utari, E., Argadinata, B., & Anwar, M. S. (2023). Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 11686-11697.
- Hayati, N. N. (2021). URGENSI PELIBATAN GENERASI MUDA DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 YANG DEMOKRATIS. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 23-34.
- Sinaga, K. (2023). ANALISIS PARTISIPASI PUBLIK MENUJU DEMOKRASI BERKUALITAS PADA PEMILIHAN UMUM INDONESIA TAHUN 2024. *Warta Dharmawangsa*, 17(3), 1396-1412.
- Arlen Intani. (2023). Pemilu Serentak Tahun 2024: Prediksi Partisipasi Politik Masyarakat Mengacu Pada Perbandingan Anggaran Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 2986-6340.
- Rismawati, Putri U., Emilia U., Bagas A., Moh. Syaiful A. (2023). Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak 2024. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2807-4246